

## **ANALISIS JENIS - JENIS PAJAK DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI**

<sup>1</sup>Nanda Kuswandari, <sup>2</sup>Moch Alfiana Chandra Jani, <sup>3</sup>Aisyah Mega Benazira, <sup>4</sup>Gina Sakinah

<sup>1,2,3,4</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [nandakuswandari17@gmail.com](mailto:nandakuswandari17@gmail.com) , [malpiana1120@gmail.com](mailto:malpiana1120@gmail.com) , [aisyahmegab@gmail.com](mailto:aisyahmegab@gmail.com) ,  
[ginasakinah1004@uinsgd.ac.id](mailto:ginasakinah1004@uinsgd.ac.id)

### *Abstract*

This article explores the tax classification system in Indonesia and its economic implications across various strategic sectors. Taxes are categorized based on type (direct and indirect), nature (subjective and objective), and the responsible authority (central and regional government). The analysis focuses on the effects of income tax on investment decisions, the influence of Value Added Tax (VAT) on the prices of goods and services, and the role of regional taxes in financing infrastructure projects. Income tax may either discourage or stimulate investment depending on the applied tax incentives. VAT tends to raise consumer prices, potentially affecting purchasing power and contributing to inflation. Furthermore, local taxes serve as a critical funding source for infrastructure development, though their effectiveness hinges on the fiscal management capacity of local governments. This study provides a comprehensive overview of the role of taxation in promoting sustainable national and regional economic development.

**Keywords:** Taxation, Investment, Income Tax, VAT, Infrastructure, Regional Tax, Fiscal Policy

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji struktur dan klasifikasi perpajakan di Indonesia serta dampak ekonominya pada beberapa sektor strategis. Pajak dibedakan berdasarkan kategori golongan (langsung dan tidak langsung), sifat (subjektif dan objektif), serta lembaga pemungutnya (pajak pusat dan pajak daerah). Fokus utama pembahasan adalah pengaruh Pajak Penghasilan terhadap keputusan investasi, dampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap harga barang dan jasa, serta kontribusi pajak daerah dalam pembiayaan infrastruktur. Pajak penghasilan dapat menjadi hambatan atau pendorong investasi tergantung pada kebijakan insentif yang diterapkan. Sementara itu, PPN berpotensi meningkatkan harga jual barang dan jasa, yang berdampak pada daya beli dan inflasi. Di sisi lain, penerimaan dari pajak daerah menjadi sumber utama pendanaan pembangunan infrastruktur, namun efektivitasnya sangat tergantung pada kualitas pengelolaan fiskal daerah. Artikel ini memberikan gambaran komprehensif mengenai peran pajak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah secara berkelanjutan. **Kata Kunci:** Strategi, Keuangan Syariah, Indonesia Emas 2045.

**Kata Kunci:** Perpajakan, Investasi, Pajak Penghasilan, PPN, Infrastruktur, Pajak Daerah, Kebijakan Fiskal

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah sebagai sumber pendanaan negara. Perpajakan memiliki peranan yang sangat krusial bagi suatu negara, karena dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan untuk pengeluaran atau belanja negara (Halim et al., 2020). Berbagai studi menunjukkan bahwa

kebijakan pajak memiliki dampak yang kompleks terhadap pertumbuhan ekonomi. Pajak yang dirancang dengan tepat dapat meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan membiayai pembangunan infrastruktur yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, tarif pajak yang tinggi atau sistem perpajakan yang rumit dapat mengurangi insentif berusaha dan menekan konsumsi masyarakat, sehingga berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi (Maulana et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan laporan resmi pemerintah yang membahas jenis-jenis pajak di Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara berbagai jenis pajak dan pengaruhnya terhadap ekonomi nasional. Validasi data dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil penelitian. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran perpajakan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **I. Jenis-Jenis Pajak Yang Diterapkan Di Indonesia**

Menurut Resmi (2014:7), klasifikasi pajak dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu berdasarkan golongan, sifat, serta instansi yang memungut pajak. Penjabaran dari masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

#### **a. Klasifikasi Berdasarkan Golongan**

Pajak dikategorikan menjadi dua jenis:

1. **Pajak Langsung:** Jenis pajak ini dibebankan secara langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Kewajiban pembayaran sepenuhnya berada di tangan wajib pajak yang bersangkutan. Contoh dari pajak langsung adalah **Pajak Penghasilan (PPh)**.
2. **Pajak Tidak Langsung:** Merupakan jenis pajak yang bebannya dapat diteruskan atau dialihkan kepada pihak ketiga. Pajak ini biasanya dikenakan karena adanya transaksi ekonomi tertentu seperti penyerahan barang atau jasa. Contohnya adalah **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**.

#### **b. Klasifikasi berdasarkan sifat**

Dalam hal ini, pajak dibedakan menjadi 2 sifat, yaitu:

1. **Pajak Subjektif:** Pajak yang pengenaannya mempertimbangkan keadaan pribadi subjek pajak, termasuk aspek seperti status dan kemampuan ekonominya. Contoh dari pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh).
2. **Pajak Objektif:** Jenis pajak ini dikenakan berdasarkan objek tertentu tanpa

mempertimbangkan kondisi subjek pajak. Objek yang dimaksud bisa berupa barang, keadaan, atau aktivitas yang memicu kewajiban membayar pajak. Contohnya meliputi PPN, PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

c. Klasifikasi pajak berdasarkan lembaga pemungutan

Pajak juga dapat dibedakan berdasarkan instansi yang berwenang memungutnya, yaitu:

1. Pajak Pusat: Merupakan jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, dan hasil penerimaannya digunakan untuk mendanai kebutuhan belanja negara secara umum. Contoh dari pajak pusat antara lain **Pajak Penghasilan (PPh)**, **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**, dan **Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**.
2. Pajak Daerah: Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi (daerah tingkat I) maupun kabupaten/kota (daerah tingkat II), dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah masing-masing. Contoh pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, **serta** Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

## II. Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Investasi

Pajak penghasilan memiliki keterkaitan yang rumit dan beragam dengan dunia investasi. Dampaknya tidak selalu buruk dan dipengaruhi oleh berbagai elemen, seperti besaran pajak, tipe investasi, dan kebijakan keuangan pemerintah. Tingkat pajak penghasilan yang tinggi bisa menurunkan keuntungan dari investasi sehingga menimbulkan pengaruh negatif. Investor mungkin akan ragu untuk berinvestasi jika sebagian besar laba mereka akan diserahkan kepada pemerintah karena pajak. Ini sangat relevan dalam hal investasi yang menawarkan pengembalian yang tidak terlalu tinggi. Proses perpajakan yang rumit dan birokrasi yang rumit juga dapat menjadi hambatan untuk berinvestasi, meskipun tarif pajaknya tergolong rendah (Melvern, 2024).

Pemerintah sering memanfaatkan insentif pajak untuk merangsang investasi di bidang-bidang tertentu atau untuk mencapai target ekonomi tertentu. Insentif ini dapat berupa pemotongan pajak penghasilan, libur pajak, atau bentuk keringanan pajak lainnya. Insentif ini dapat meningkatkan keuntungan investasi dan mendorong para investor untuk menempatkan dana mereka di sektor-sektor yang diinginkan oleh pemerintah. Namun, keberhasilan insentif pajak sering kali tergantung pada cara desain dan pelaksanaannya. Prosedur yang rumit dapat mengurangi efektivitas dari insentif tersebut (Aurora, 2025).

Selain pajak penghasilan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap investasi:

1. Suku bunga
2. Ekspektasi keuntungan
3. Stabilitas politik dan ekonomi
4. Ketersediaan infrastruktur

## III. Dampak PPN Terhadap Harga Barang dan Jasa

Secara umum, PPN menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih mahal. Sebagai pajak tidak langsung yang dibebankan melalui harga jual, konsumen pada akhirnya yang harus menanggung beban tersebut. Seberapa besar kenaikannya tergantung

pada besaran tarif PPN dan karakteristik barang atau jasa yang dijual. Jika tarif PPN naik, harga jual cenderung ikut meningkat, kecuali produsen memilih untuk menanggung sebagian atau seluruh tambahan biaya tersebut. (Aura, 2025)

Dampak PPN terhadap harga barang dan jasa sebagai berikut:

1. **Tingkat Kenaikan Harga:** Kenaikan tarif PPN tidak selalu berbanding lurus dengan lonjakan harga di pasar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti tingkat persaingan, seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga (elastisitas permintaan), serta kekuatan tawar produsen. Produsen yang memiliki posisi kuat di pasar cenderung lebih mampu mengalihkan beban PPN ke konsumen. Sebaliknya, produsen yang menghadapi persaingan ketat mungkin harus menanggung sebagian beban agar tetap kompetitif (Aura, 2025).
2. **Pengaruh ke Konsumen:** Harga yang lebih tinggi akibat PPN bisa menekan daya beli, khususnya bagi konsumen berpenghasilan rendah. Akibatnya, mereka mungkin mengurangi pengeluaran atau beralih ke produk dan layanan yang lebih terjangkau.
3. **Dampak terhadap Produsen:** Produsen harus mempertimbangkan faktor PPN dalam menentukan strategi harga. Jika tidak bisa menaikkan harga sesuai kenaikan tarif, margin keuntungan bisa tergerus. Di samping itu, kepatuhan terhadap aturan perpajakan jadi penting untuk menghindari risiko sanksi.
4. **Barang Mewah vs Barang Umum:** Barang mewah cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh kenaikan harga, karena pembelinya relatif tidak sensitif terhadap perubahan biaya. Ini memberi ruang bagi produsen untuk membebankan PPN sepenuhnya. Sebaliknya, untuk barang kebutuhan sehari-hari, produsen mungkin harus menyesuaikan strategi agar tetap terjangkau. (Aura, 2025)
5. **Inflasi:** Secara makro, peningkatan tarif PPN bisa memicu tekanan inflasi, apalagi jika pendapatan masyarakat tidak ikut naik. Lonjakan harga akibat pajak dapat mendorong naiknya biaya hidup secara keseluruhan

#### **IV. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur**

Pajak daerah memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan Pembangunan infrastruktur. Dana yang diperoleh dari pajak-pajak daerah menjadi salah satu sumber utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Meningkatnya pendapatan dari pajak daerah secara langsung membuka peluang lebih besar untuk mendanai berbagai inisiatif pembangunan. (Rosiana, 2020).

Pemerintah daerah memungut berbagai jenis pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan pajak-pajak lain. Pendapatan dari sumber-sumber ini masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian dari anggaran tersebut kemudian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Artinya, semakin besar pendapatan pajak yang dikumpulkan, semakin besar pula kapasitas anggaran yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur. (Aprilia, 2022).

Meski demikian, hubungan antara pendapatan pajak daerah dan pembangunan infrastruktur tidak selalu berjalan mulus. Beberapa faktor berikut turut memengaruhi efektivitasnya:

1. **Efisiensi Pengelolaan Keuangan:** Tingginya penerimaan pajak tidak akan berdampak

signifikan jika pengelolaan keuangan tidak tertata dengan baik. Masalah seperti korupsi dan pemborosan anggaran bisa mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan.

2. Penentuan Skala Prioritas: Besarnya anggaran infrastruktur juga tergantung pada kebijakan dan fokus pembangunan di suatu daerah. Bila sektor lain seperti pendidikan atau kesehatan menjadi prioritas utama, maka alokasi untuk infrastruktur bisa saja lebih kecil meski penerimaan pajak cukup besar.

3. Sumber Dana Alternatif: Selain dari pajak daerah, pemerintah bisa mendapatkan dana infrastruktur dari berbagai sumber lain seperti transfer dari pemerintah pusat, pinjaman, atau kerja sama dengan investor swasta. Keberadaan sumber-sumber ini dapat melengkapi atau bahkan mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pajak daerah.

4. Kondisi Ekonomi Lokal: Kinerja ekonomi daerah berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi yang baik biasanya disertai dengan meningkatnya pendapatan daerah, sehingga anggaran pembangunan ikut terdongkrak. Sebaliknya, saat ekonomi lesu, penerimaan pajak pun berkurang dan berimbas pada terbatasnya ruang fiskal untuk pembangunan. (Aprilia, 2022)

#### **V. Tantangan pemungutan pajak dan dampaknya terhadap ekonomi**

Pendapatan terbesar di Indonesia hingga saat ini dari seluruh yang dialokasikan ke dalam APBN ialah pendapatan pajak, dengan populasi yang lebih dari 280 juta jiwa yang taat dalam pembayaran pajak. Pajak adalah penghasilan utama yang digunakan pemerintah dalam mengalokasikan pendapatan yang diperlukan dalam membiayai berbagai program dan pelayanan publik dengan tujuan memperbaiki ekonomi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, reformasi pajak menciptakan system perpajakan secara efektif dan efisien sehingga penerimaan negara dari pajak tumbuh secara signifikan yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menyelenggarakan negara yang sejahtera dan bermartabat. Indikator keberhasilan di berbagai daerah yaitu peningkatan penerimaan pajak yang mewujudkan peningkatan ekonomi (Gebreegziabher, 2018). Menurut Mdanat (2018), peningkatan penerimaan pajak tidak selamanya menjadi ciri pertumbuhan ekonomi, karena digunakan untuk mendanai hal yang tidak memiliki nilai produktif kecuali membangun proyek atau aktivitas yang produktif.

Berbagai undang-undang yang mengatur sistem perpajakan di Indonesia, seperti UU tentang Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan lainnya sering berubah karena penyesuaian peraturan pemerintah, menteri, dan intervensi pajak. Hal ini menimbulkan ketidakpastian pajak yang membuat masyarakat Indonesia tidak membayar pajak, perubahan tersebut tidak lepas dari intervensi pemerintah yang ambigu, dan perbedaan praktik administrasi dari tiap daerah. Dampak dari ketidakjelasan peraturan tersebut yaitu rendahnya kepatuhan wajib pajak dan potensi kehilangan investasi sebagai hal utama dalam membangun pertumbuhan ekonomi, serta pencucian uang dan praktik perpajakan ilegal yang membuat masyarakat tidak patuh terhadap bayar pajak dengan persentase kepatuhannya 7,9% di tahun 2020 sehingga hal tersebut terjadi karena sistem pelaporan dan pengawasan lemah.

Ketidakmampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak secara efisien menyebabkan penerimaan negara dan pembangunan yang berkepanjangan berkurang, sehingga perlu melakukan perbaikan administrasi pajak seperti pelatihan pajak, penguatan peraturan pajak, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak dan pemahaman kepada wajib pajak tentang pajak. Selain itu, tantangan dalam perpajakan sangatlah banyak, seperti manipulasi data administrasi pajak yang dilakukan oleh pengusaha atau wajib pajak lainnya, pejabat korupsi, bahkan banyak yang menghindari untuk bayar pajak. Hal tersebut timbul karena realisasi pajak yang didapatkan wajib pajak tidaklah terasa dikalangan masyarakat seperti pembangunan tidak berlanjut, jalan rusak tidak diperbaiki, jaminan kesehatan tidak menyeluruh, dan lain sebagainya

## KESIMPULAN

Perpajakan di Indonesia sangatlah beragam seperti PPN, PBB, Pph, dan lainnya, sehingga pendapatan yang dihasilkan darinya dapat dikumpulkan dalam kas negara dan dijadikan sebagai penunjang ekonomi serta pembangunan dalam berbagai sektor untuk kemajuan bangsa Indonesia. Pendapatan pajak Indonesia menjadi penerimaan kas negara paling besar dari sektor lainnya, dengan meraup sebesar Rp1.932,4 Triliun pada tahun 2024 tumbuh sebesar 3.5% dari tahun sebelumnya. Dalam menentukan tarif pajak sangat berpengaruh terhadap kebijakan fiskal seperti pendanaan investasi baik dari dalam atau luar, daya beli masyarakat, dan pembayaran wajib pajak pribadi. Selain itu, administrasi perpajakan seperti hukum, dokumen, dan lainnya yang berhubungan dengannya haruslah transparansi, efisien, dan adil dalam merealisasikan penerimaan pajak atau pada saat memproses pajak. Pemerintah perlu melanjutkan reformasi perpajakan dengan menyederhanakan jenis dan prosedur pajak agar lebih efisien dan mudah dipahami. Edukasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan untuk mendorong kepatuhan sukarela. Selain itu, transparansi dalam penggunaan dana pajak penting untuk membangun kepercayaan publik. Kebijakan pajak sebaiknya pro terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti dengan memberikan insentif bagi UMKM dan sektor strategis. Terakhir, digitalisasi sistem perpajakan perlu diperkuat guna meningkatkan akurasi, pengawasan, dan kemudahan layanan bagi wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Aminof, A. (2025). *Marak! 2025 Kenaikan PPN 12%: dampak pada Harga Barang dan Jasa*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/aminof-aura/marak-2025-kenaikan-ppn-12-dampak-pada-harga-barang-dan-jasa-24D8Nh3Amfq>
2. Aurora. (2025). *Pacu Ekonomi di Kuartal II/2025, Insentif Pajak Digelontorkan Lagi?* DDCT News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810542/pacu-ekonomi-di-kuartal-ii2025-insentif-pajak-digelontorkan-lagi>
3. Habib Saragih, A. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia the Effect of Tax Revenue on the Economic Growth in Indonesia. *Sikap*, 3(1), 17–27. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>
4. Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Edisi 3 PERPAJAKAN*. [https://www.academia.edu/50816475/Buku\\_Perpajakan](https://www.academia.edu/50816475/Buku_Perpajakan)
5. Pajak.go.id. (2022). *Kenali PBB, Pajak Sejak Dulu Kala*. Pajak.Go.Id.

[https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/kenali-pbb-pajak-sejak-dulu-kala#:~:text=Sejak tahun 2014%2C pengelolaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan sepenuhnya beralih dari pemerintah pusat%2C dalam hal ini diwakilkan Direktorat Jenderal Pajak \(DJP\)%2C kepada pemerintah kabupaten%2Fkota](https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/kenali-pbb-pajak-sejak-dulu-kala#:~:text=Sejak tahun 2014%2C pengelolaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan sepenuhnya beralih dari pemerintah pusat%2C dalam hal ini diwakilkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)%2C kepada pemerintah kabupaten%2Fkota)

6. Pane, S. G., Fernanda, R. L., Althaaf, S. N., Waruwu, T. J. P., & Silalahi, M. S. (2024). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 751–757. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i2.3345>
7. Rahma, A., Hariyati, Y., & Hani, E. S. (2023). Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di masa Pandemi Covid-19. *Nal Pertanian*, 25(1), 661–679.
8. Rioni, Y. S. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/805>
9. Wahyuni, F. (2023). Reformasi Hukum Pajak Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Untuk Peningkatan Keadilan Fiskal. *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(2), 80.